

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Tuntutan adanya transparansi keuangan daerah semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan adanya kebutuhan mengenai pertanggungjawaban (*accountability*) pengelolaan keuangan daerah kepada pihak yang membutuhkan. Dalam prinsip transparansi membutuhkan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan transparansi untuk informasi pengungkapan laporan keuangan kepada publik. (Jatmiko,2016) Adapun bentuk dari transparansi adalah dengan menyediakan semua informasi yang dapat dirilis secara legal baik positif maupun negatif secara akurat, tepat waktu, seimbang, dan tegas untuk meningkatkan penalaran publik dan memiliki tanggung jawab.

Masyarakat pada dasarnya menginginkan pemerintahan dapat mengelola keuangan dengan baik dan bebas dari kegiatan-kegiatan yang memanupulasi, yakni korupsi. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau kepentingan, dibutuhkan suatu kinerja yang konsisten baik pemerintah dan masyarakat dalam konteks mencegah terjadinya tindakan korupsi serta penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi.

Salah satu tindakan yang diharapkan mampu meminimalisasi kegiatan korupsi dan memenuhi harapan masyarakat berkaitan dengan *good governance* adalah akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Halim (2004) yang dikutip dari Setyanto (2018), menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Hal ini terkait dengan adanya kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri sehingga memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan keuangan menjadi pengendali dalam mewujudkan akuntabilitas publik dan kualitas laporan keuangan serta manajemen. Hal

ini dapat dicapai apabila adanya peran masyarakat dan dewan dalam memantau pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan. Aminah (2013), juga berpendapat bahwa dalam menciptakan akuntabilitas publik, partisipasi pemimpin lembaga dan anggota masyarakat diperlukan dalam persiapan dan pengawasan keuangan daerah (APBD), sehingga bahwa akuntabilitas publik yang tinggi akan memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan.

Penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki peran yang penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Rakhmawati (2018), menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi ini yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan atas pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat penerapan SAP maka diharapkan semakin baik pula akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Penelitian Setyanto dan Ritchi (2018) serta Ichsan, dkk (2014), menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah.

Selain SAP, faktor sistem pengendalian internal (SPI) juga memiliki peranan penting dalam mendukung akuntabilitas laporan keuangan. Pemahaman yang memadai tentang SPI juga perlu dilakukan, hal ini karena SPI akan memfasilitasi masalah deteksi dan pengungkapan yang ditemukan. SPI mampu memiliki tindakan manipulasi yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan daerah. (Arfan,2016) Penilaian SPI berguna untuk mengidentifikasi sistem dan prosedur pengendalian internal manajemen keuangan yang berisiko terhadap terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman SPI, semakin baik proses penyusunan laporan keuangan daerah. Dengan kata lain jika semakin tinggi penerapan sistem

pengendalian intern, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah. Penelitian Setyanto dan Ritchi (2018), Yuliani (2017) dan Ichsan, dkk (2014), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah.

Aksesibilitas laporan keuangan juga merupakan faktor yang meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah. Pemberian kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan mutlak diperlukan agar masyarakat bisa mengontrol pengelolaan keuangan daerah dan memiliki peran dalam melakukan evaluasi terhadap pemerintah khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Lewier (2016), Aliyah (2012) dan Sukhemi (2011), menyatakan bahwa kemudahan aksesibilitas memiliki efek positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Namun Yuliani (2017) dalam studinya menemukan hasil lain, dimana aksesibilitas tidak memiliki pengaruh.

Penelitian berkaitan dengan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi telah dilakukan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Pada penelitian Ichlas, dkk (2014), ditemukan bahwa penerapan SAP, SPI, dan aksesibilitas memiliki pengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Wardhani (2017), dalam studinya mampu membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia dan SPI berpengaruh positif secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa. Santha Julia Sardi, dkk (2016), yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satker Balai Besar BMKG Wilayah III Denpasar-Bali)”, mampu memberikan bukti bahwa kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sementara itu kejelasan sasaran anggaran dan sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan ini merujuk pada penelitian Ichlas (2014), menguji faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan pemerintah. Namun penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan dari penelitian Ichlas (2014), yaitu berkaitan dengan sampel penelitian, dimana penelitian yang dilakukan menggunakan OPD pada Kabupaten Demak sebagai sampel, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) pada seluruh instansi/lembaga di lingkungan Pemerintah Kota Banda. Hal ini bertujuan agar penulis menemukan fenomena lain mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan akuntabilitas penyajian laporan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Demak.

Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan hasil empiris pada penelitian sebelumnya serta mengingat pentingnya akuntabilitas keuangan pada pemerintah daerah, perlu untuk dilanjutkan kembali dalam mengkajinya dan penulis tertarik melakukan studi lanjutan dengan judul : **“PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Demak?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Demak?
3. Bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Demak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Demak?
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Demak?
3. Untuk menganalisis pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Demak?

1.4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi sektor publik, yaitu mengenai akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Demak untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik, yaitu dengan mempertimbangkan penerapan SaP, SPI dan kemudahan aksesibilitas.